

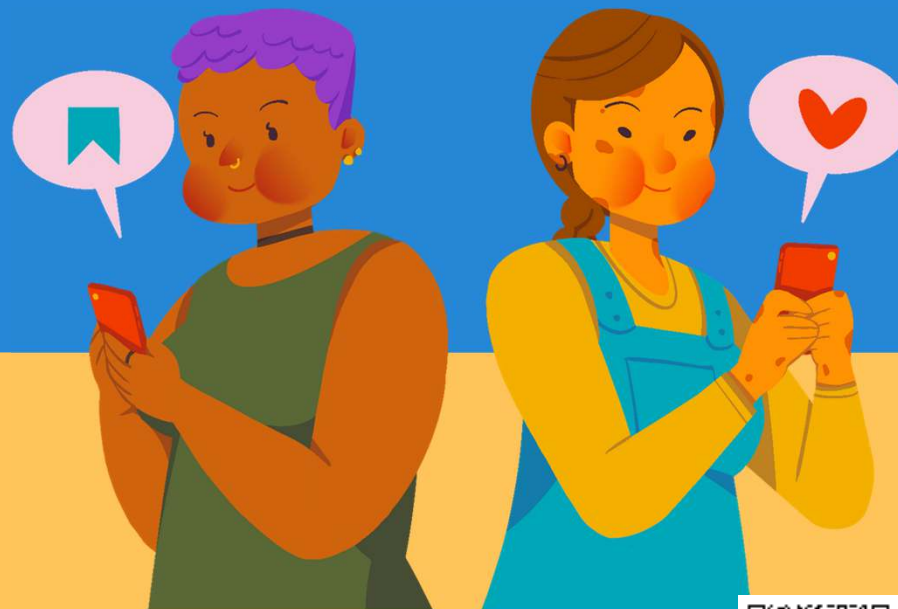


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DJPK

NOVEMBER 2025



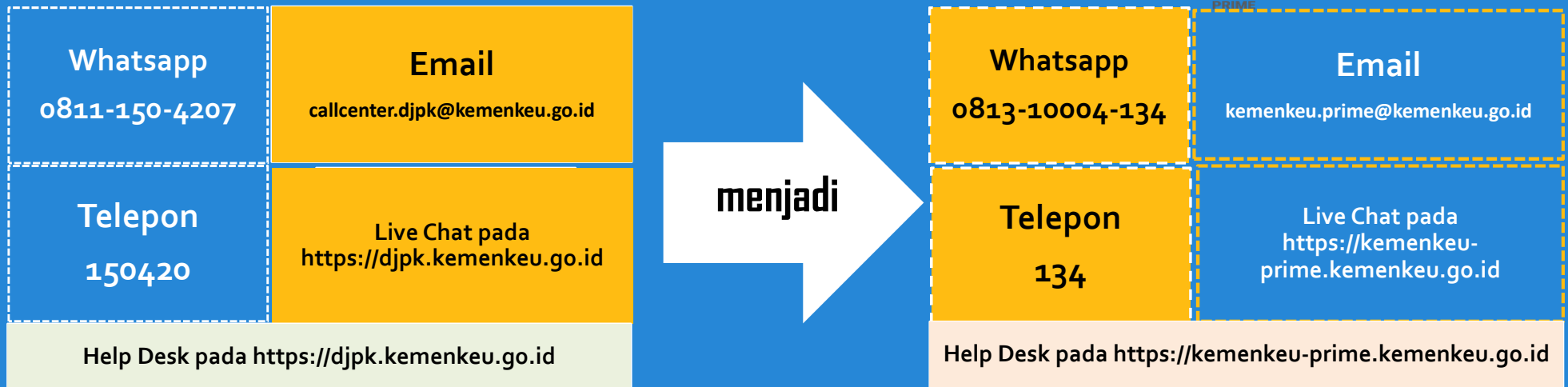


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Media Layanan Informasi DJPK

Mulai 16 Juni 2025, kanal layanan Contact Center DJPK berkonsolidasi dengan kanal layanan Kemenkeu PRIME:



Layanan DJPK
yang Tetap Aktif

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Layanan Konsultasi *Video Conference*

melalui email reservasi DJPK:
reservasi.djpk@kemenkeu.go.id
(jam layanan hari kerja pukul 08.00
s.d. 16.00 WIB).



Ringkasan Publikasi dan Layanan Informasi

7

Publikasi
Website

37

Publikasi
Konten
Medsos

**rata-rata publikasi media sosial*

491

Tiket
Konsultasi

**pascakonsolidasi
hanya Email yang ke
L2 DJPK*

5

Webinar/FGD
/Workshop

2

Video
Conference

38

Konsultasi
Tatap Muka

8

Blast
WhatsApp
/Email

99

Email Reservasi
DJPK

19

PPID



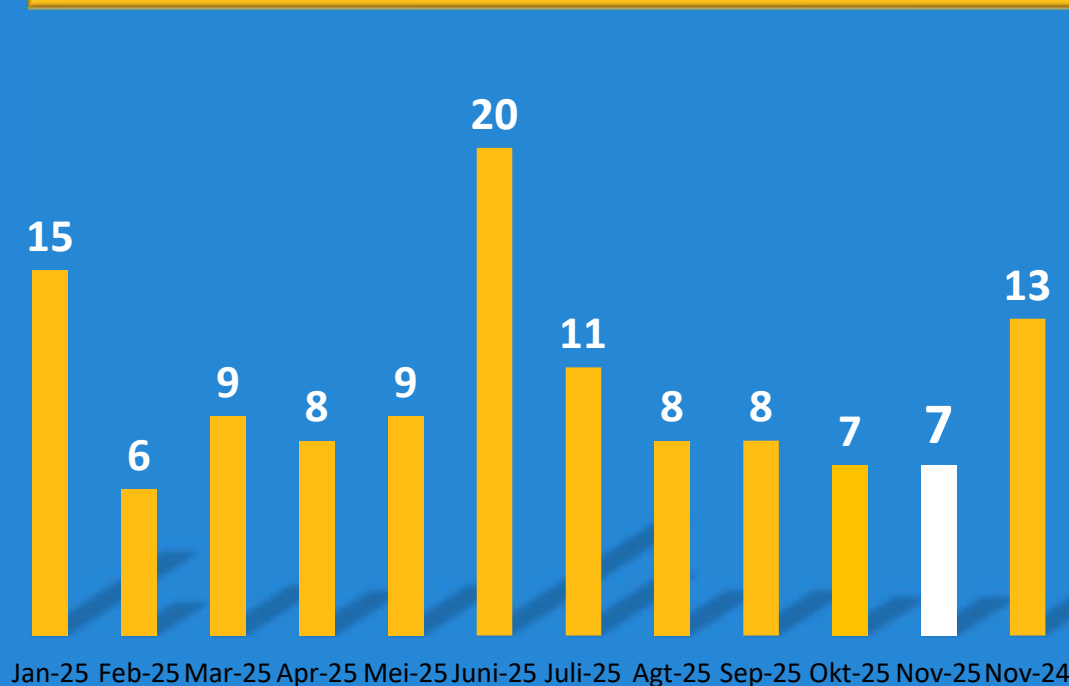
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Publikasi Website DJPK

Pada November 2025, terdapat 7 publikasi pada Website DJPK yang terdiri dari antara lain peraturan, berita, dan konsultasi publik.

Jumlah publikasi website November 2025 **sama** dibandingkan bulan sebelumnya dan **turun 46%** dibandingkan November 2024 (13).





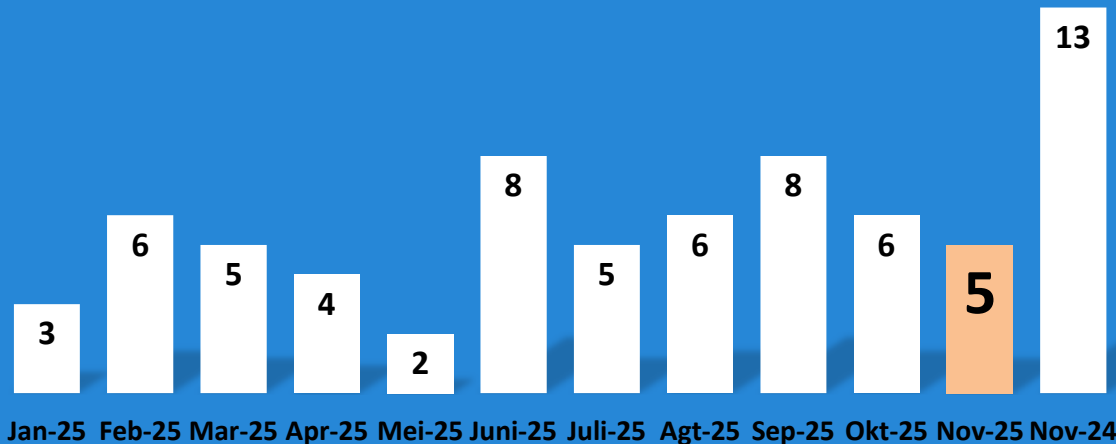
Rincian Publikasi *Website* DJPK

No.	Nama Publikasi	Jenis Publikasi
1	Report on The Results of District Nutrition Budget Tagging, Tracking, and Evaluation in Supporting The Acceleration of Stunting Prevention and Reduction	Berita
2	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2026	Peraturan
3	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Persyaratan Penyaluran serta Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Penurunan Stunting Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan
4	Pedoman Teknis Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan di Indonesia	Pemberitahuan ke Daerah
5	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025	Peraturan
6	Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Peraturan
7	Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 58/PK/2025 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2026	Peraturan



Publikasi Webinar/FGD/Workshop DJPK

Perkembangan Publikasi Webinar DJPK



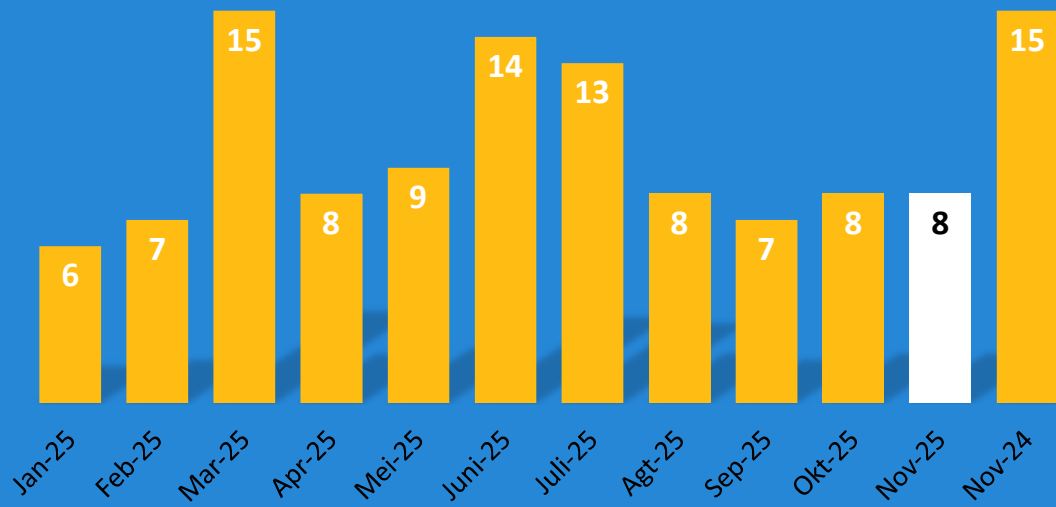
No.	Nama Publikasi	Jenis Publikasi
1	SERASI 2025 Eps14 - Dana Abadi Daerah: Menyemai Dana Hari Ini, Menuai Manfaat untuk Lintas Generasi	Webinar
2	SERASI 2025 Eps15 - Kupas Tuntas Kewajiban NITKU dan SPT Masa PPh 21 Bagi Instansi Pemda	Webinar
3	DIRGA - Diskusi Regulasi dan Gagasan DDIOKK - Episode 4	Webinar
4	Launching Dashboard ALIFA & Modul E-Learning PPRA	Sosialisasi
5	SAJAK Edisi Spesial - PMK 81 Tahun 2025: Kebijakan Baru Penyaluran Dana Desa Tahap II 2025	Webinar

Publikasi webinar November 2025 **turun 17%** jika dibandingkan dengan publikasi webinar bulan sebelumnya (6) dan **turun pula (62%)** jika dibandingkan dengan publikasi November 2024 (13)



Layanan Email dan WA Blast

Perkembangan Layanan *Email dan WA Blast*



Mulai 16 Juni 2025, layanan distribusi informasi melalui email dan whatsapp blast dilakukan oleh Kemenkeu PRIME dengan permohonan/ korespondensi dari DJPK.

No.	Tanggal	Perihal
1	3-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast: Polite Reminder SERASI Eps 14
2	16-Nov-25	Permohonan Pengiriman Whatsapp Blast Informasi Pendaftaran SERASI Episode 15
3	24-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast: Polite Reminder SERASI Eps 12
4	24-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast: Informasi Progra, SERASI Eps 14
5	24-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast: Polite Reminder SERASI Eps 15
6	28-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast: Pendaftaran Program SAJAK Bait 6
7	28-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast: Program SAJAK Edisi Special
8	30-Nov-25	Permohonan Pengiriman WA Blast : Polite Reminder SAJAK Bait 6



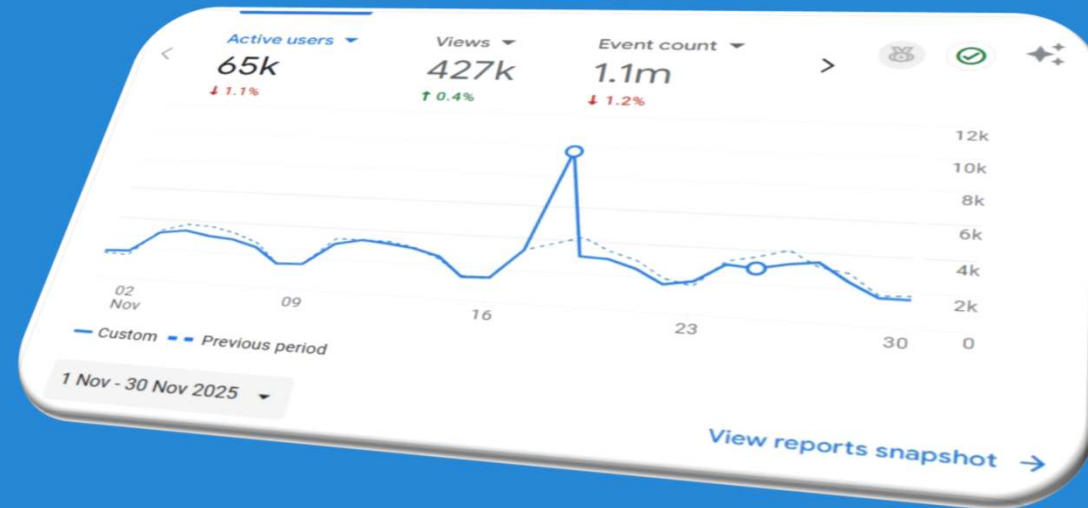
Kunjungan Website DJPK

Jumlah pengunjung website DJPK **selama November 2025** sekitar 65.000, **turun 7,1%** dibandingkan bulan sebelumnya (70.000).

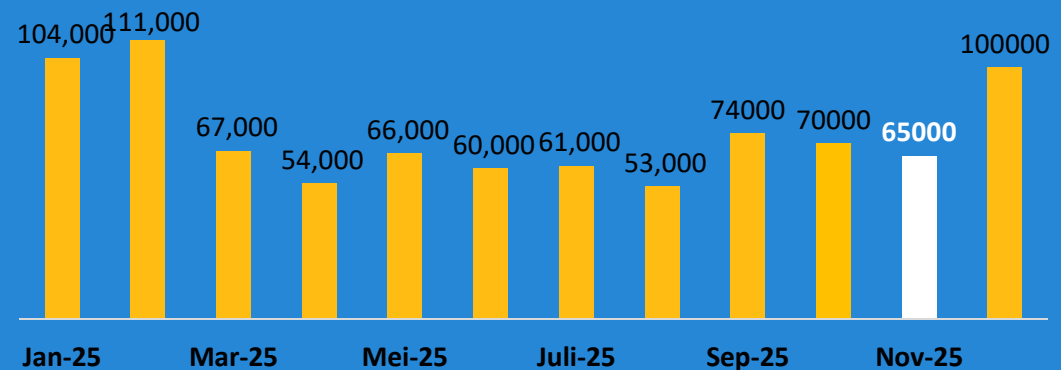
Jika dibandingkan dengan November 2024 (100.000), pengunjung *website* pada November 2025 **turun 35%**.

Halaman yang paling banyak diakses antara lain

- Portal Data SIKD;
- Rincian Dana Desa per Desa TA 2025;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Data APBD | Setelah TA 2006; dan
- Form Download Data APBD



Perkembangan Kunjungan Website



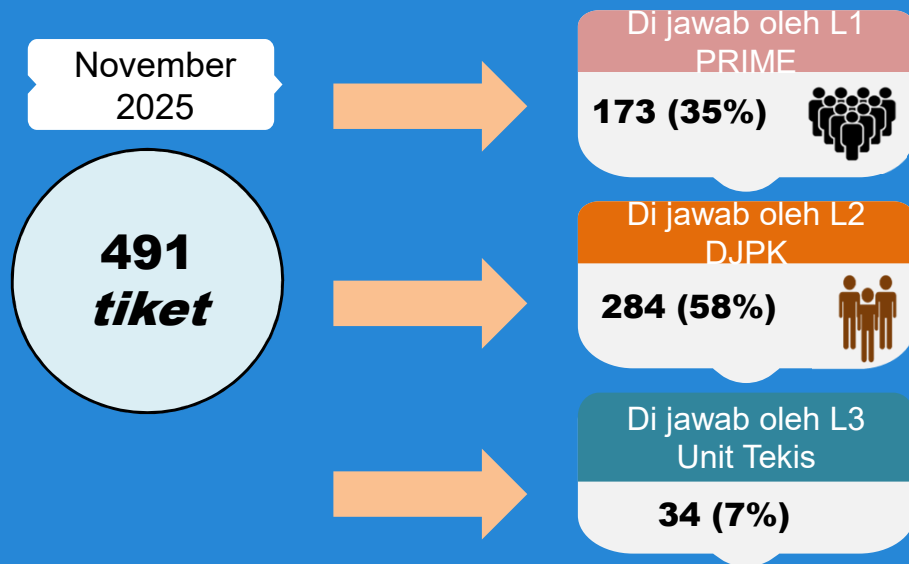


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



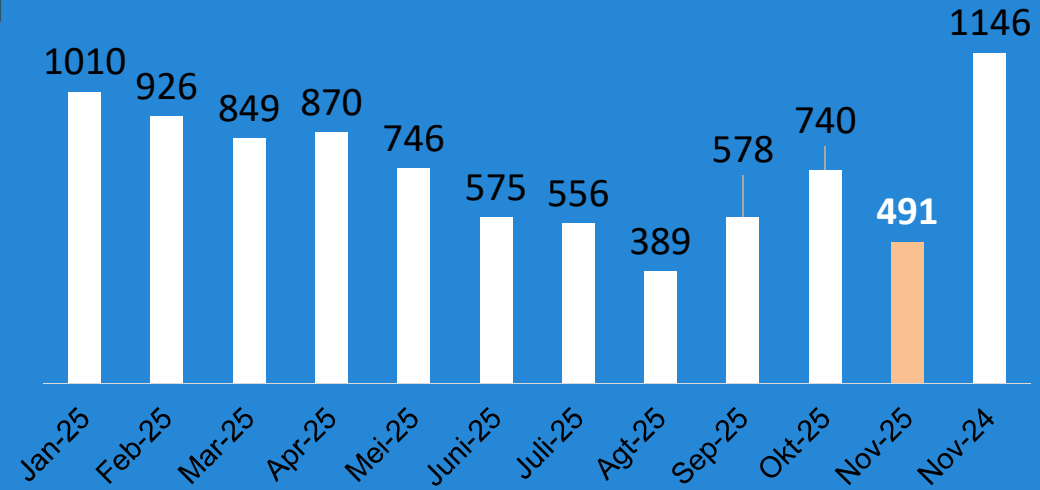
Tiket Konsultasi DJPK

Setelah konsolidasi, tiket konsultasi DJPK dari Kemenkeu PRIME dieskalasi via CRM.



Sebagian besar tiket konsultasi pengguna layanan melalui Kemenkeu PRIME diselesaikan oleh Agen L2 DJPK.

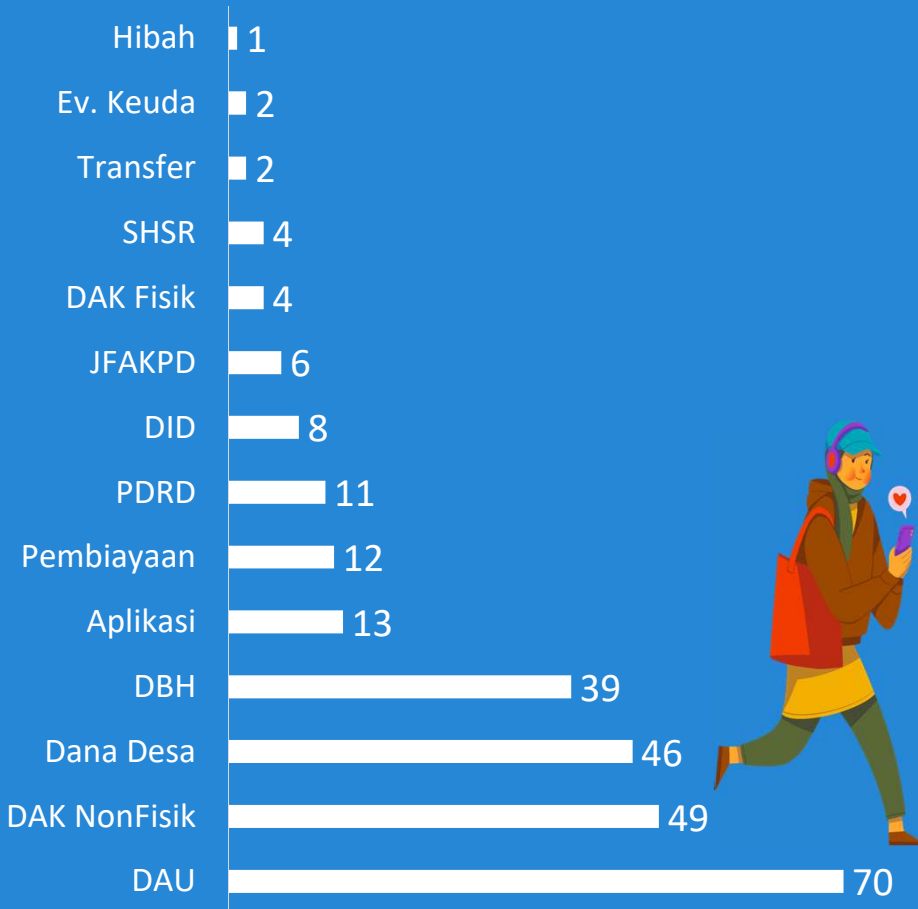
Perkembangan Jumlah Tiket Konsultasi



- Jumlah konsultasi pada November 2025 turun 34% dibandingkan bulan sebelumnya (740).
- Jika dibandingkan dengan jumlah konsultasi November 2024 (1146 konsultasi), jumlah konsultasi November 2025 turun 57%.



Topik Konsultasi Teknis



Topik DAU

1. Informasi Ketentuan Penyaluran DAU pada akhir tahun 2025; dan
2. Informasi Kebijakan DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun 2026.



Topik DAK Nonfisik

1. Informasi rekomendasi penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan III dan IV; dan
2. Informasi perbedaan nilai bersih dan SP2D pada aplikasi Caklur karena pada *dashboard* belum termasuk JKN.

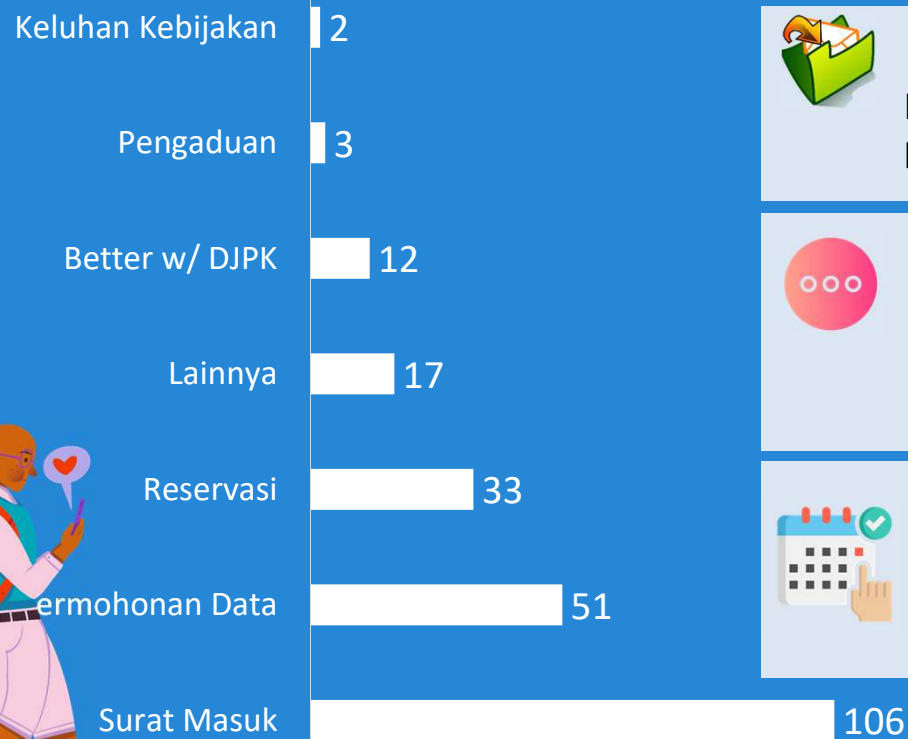


Topik Dana Desa

1. Informasi Penyaluran Dana Desa Tahap II; dan
2. Koperasi Desa Merah Putih.



Topik Konsultasi Lainnya



Surat Masuk

Mencakup penyampaian surat dan konfirmasi progres surat masuk.



Lainnya

Informasi berkaitan dengan hal lain selain Surat Masuk, Reservasi, Permohonan Data, Better w/DJPK, dan Pengaduan



Reservasi

Informasi permintaan audiensi/permohonan konsultasi ke DJPK

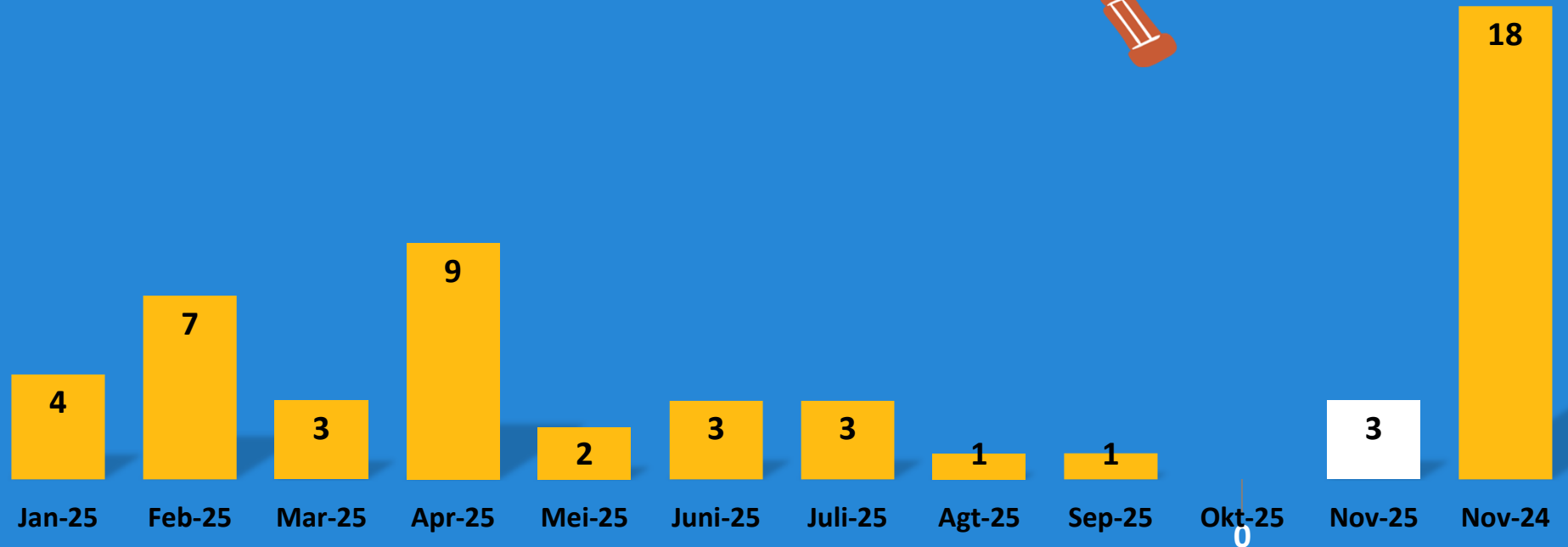




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PENGADUAN



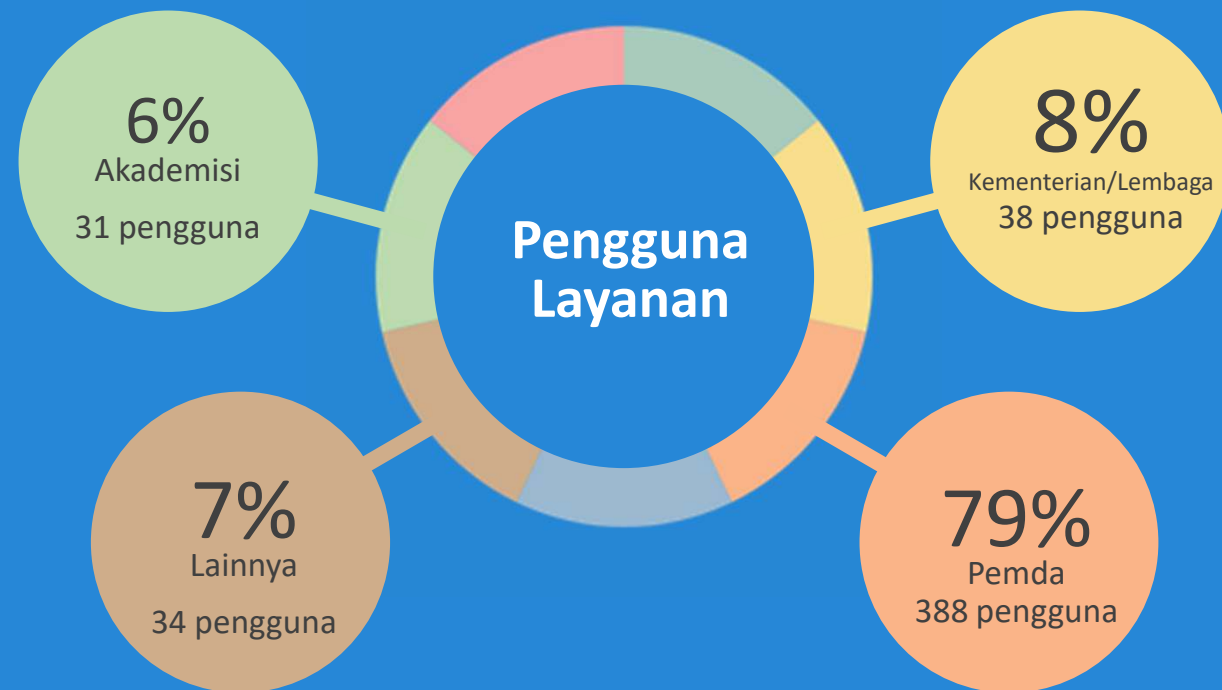
Pada November 2025, terdapat 3 pengaduan:

1. Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan (Kab. Boyolali dan Kota Semarang); dan
2. Pengaduan penggunaan dana desa oleh masyarakat.

Jumlah pengaduan November 2025 meningkat 300% dibanding bulan sebelumnya (0) dan turun sebesar 83% bila dibanding November 2024.

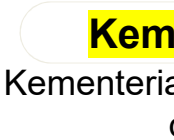


Pengguna Layanan



Pemerintah Daerah

Termasuk Anggota/ Pimpinan DPRD dan Perangkat Daerah/Desa



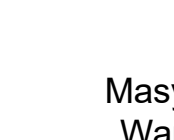
Kementerian/Lembaga

Kementerian Teknis dan Lembaga di dalam dan luar Kemenkeu



Akademisi

Guru, Dosen, Mahasiswa, dan Siswa sekolah



Lainnya

Masyarakat, Pendamping Desa, Wartawan/ Media, Swasta, dan Pengguna tanpa Identitas



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pemda Pengguna Terbanyak





Rincian Tiket Konsultasi

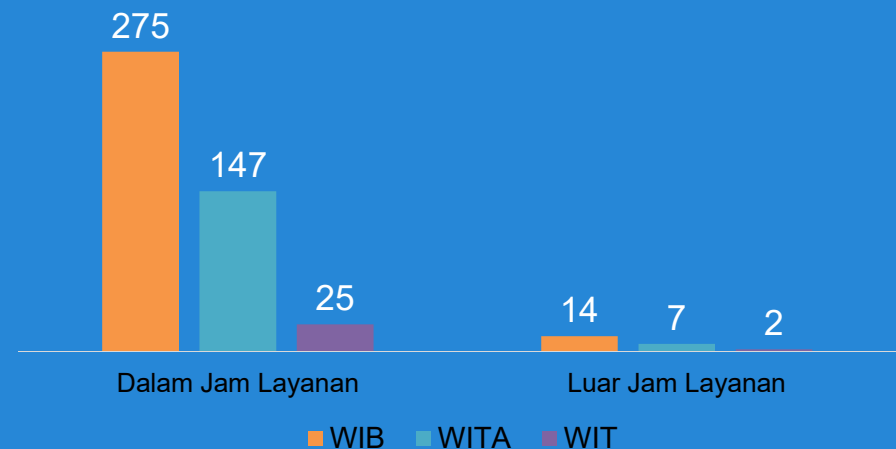
Selama November 2025, dari total 491 tiket konsultasi, sebanyak 470 tiket dapat diidentifikasi asal zona waktu, sedangkan 21 tiket sisanya tidak dapat diidentifikasi.

Dari **470** tiket yang dapat diidentifikasi zona waktunya, 447 pengguna layanan menghubungi DJPK di **dalam jam layanan**, sedangkan **23** sisanya menghubungi DJPK **di luar jam layanan** yang terdiri dari

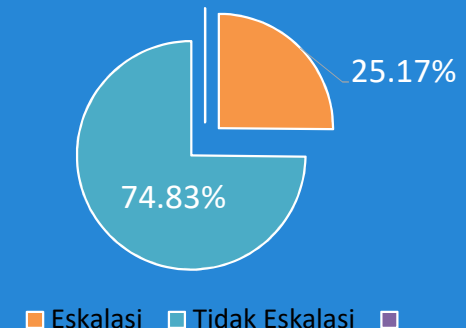
- 14 (61 %) dari bagian barat (WIB),
- 7 (33 %) dari bagian tengah (WITA), dan
- 2 (6 %) dari bagian timur (WIT).

Dari total **491** tiket, terdapat **28** tiket yang masuk di luar jam layanan, **3** di antaranya atau **11%** memerlukan eskalasi lebih lanjut.

Jumlah Pemda Menghubungi di Dalam dan Luar Jam Layanan sesuai Wilayah



Persentase Eskalasi Tiket di Luar Jam Layanan

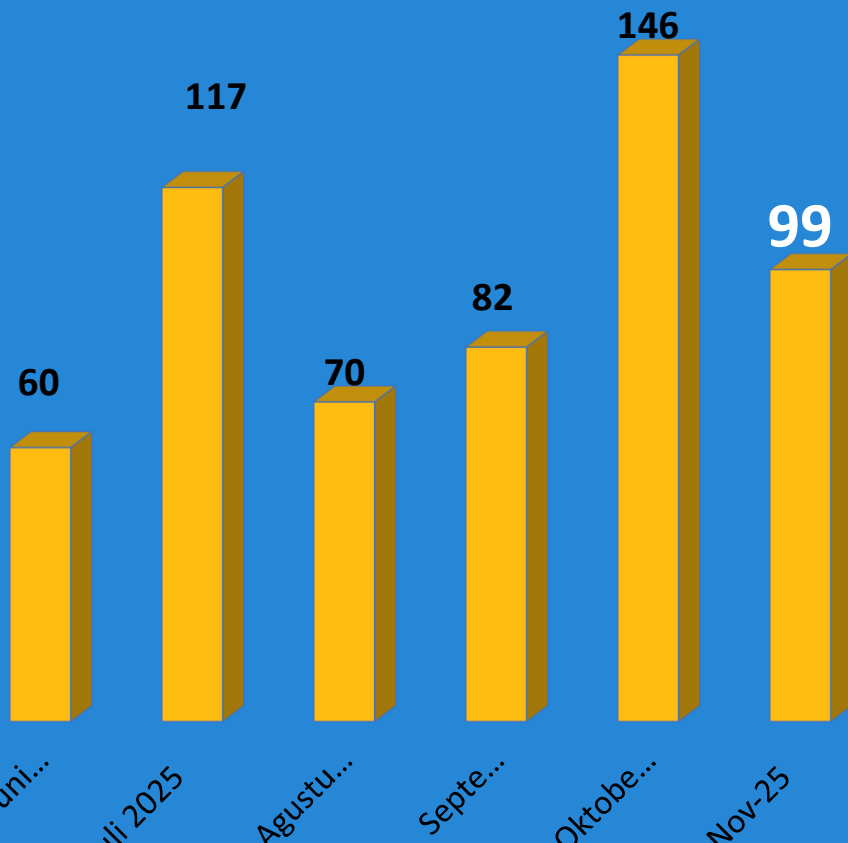




Layanan *Email* Reservasi DJPK



Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK Pasca Konsolidasi Kanal Layanan Contact Center DJPK ke Kemenkeu PRIME:



- Layanan konsultasi melalui 2 (dua) prosedur:**
 - Tatap Muka
 - *Video Conference*
- Reservasi dilakukan melalui *email*:**
reservasi.djpk@kemenkeu.go.id
- Jumlah *email* yang diterima s.d saat ini:**
574 *email* terkait permohonan konsultasi
- Agent Layer 2* DJPK:**
Bertanggung jawab sebagai tim reservasi yang menerima, menanggapi, dan mengkoordinasikan permohonan konsultasi yang masuk.



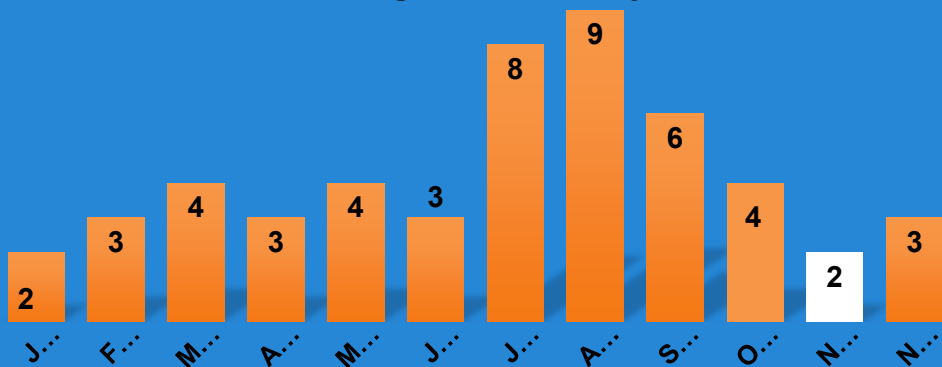
Layanan *Video Conference*

- Pada **November 2025**, telah dilaksanakan *Video Conference* melalui aplikasi Ms. Team sebanyak **2** kali.
- Jumlah *video conference* pada **November 2025** turun **50%** dibanding bulan sebelumnya (4) dan turun pula (**33%**) jika dibanding dengan November 2024 (3)
- Pasca konsolidasi, terjadi peningkatan permintaan konsultasi melalui *video conference*



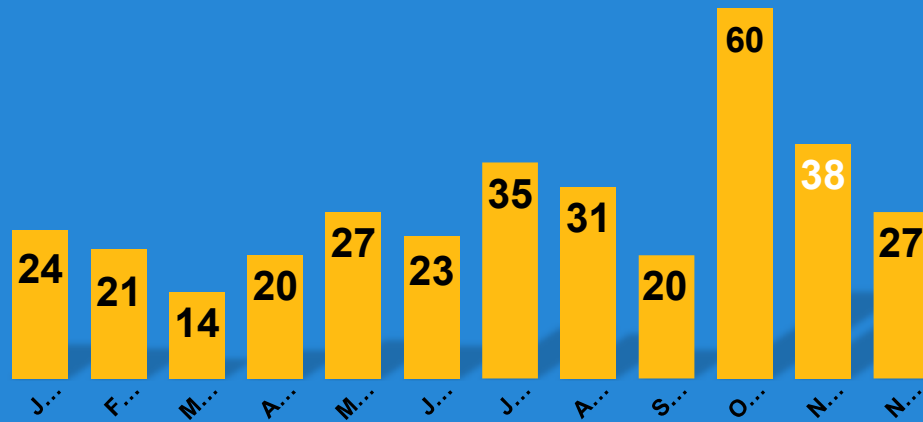
No.	Daerah	Tanggal	Topik
1	Kab. Hulu Sungai Tengah	6-Nov-25	DBH
2	Kab. Nias Utara	11-Nov-25	KUA - PPAS

Perkembangan *Video Conference*





Layanan Konsultasi Tatap Muka



Pada **November 2025**, telah dilaksanakan **38** kali konsultasi tatap muka. Jumlah ini **turun 37%** dibanding bulan sebelumnya (60), dan **naik 41%** dibandingkan November 2024 (27).

Namun, dalam pelaksanaannya beberapa Pemerintah Daerah belum mematuhi ketentuan pelaksanaan konsultasi tatap muka, seperti **jumlah tamu yang hadir melebihi ketentuan**.

No.	Daerah	Tanggal	Topik	Jumlah Tamu
1	Kab. Luwu Utara	3-Nov-25	DBH, DAU, IF	3
2	DPRD Prov. Kalimantan Selatan	3-Nov-25	Simpanan pemda	10
3	Kota Surabaya	3-Nov-25	Pinjaman Daerah	4
4	Kab. Bireuen	5-Nov-25	Otsus	5
5	Kab. Morowali Utara	5-Nov-25	DBH dan PDRD	5
6	DPRD Kab. Batu Bara	6-Nov-25	DBH, DAK Nonfisik	10
7	Kab. Parigi Moutong	6-Nov-25	DBH	2
8	Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat Daya	6-Nov-25	DAU PPPK	3
9	Kota Gorontalo	7-Nov-25	Hibah	3
10	Kota Batam	11-Nov-25	PDRD	2
11	DPRD Kota Sorong	11-Nov-25	PDRD	11
12	Kab. Jember	12-Nov-25	SHSR	4
13	DPRD Kota Kendari	12-Nov-25	DBH, IF, DAK Nonfisik	3
14	Kab. Mesuji	13-Nov-25	DAU, PDRD	8
15	DPRD Kab. Nias Utara	13-Nov-25	Mandos, DBH, IF	2
16	DPRD Kota Yogyakarta	13-Nov-25	PDRD	5
17	DPRD Prov. Sulawesi Tengah	14-Nov-25	DAU, DBH	8
18	Kab. Buru	14-Nov-25	TKD 2026, Mandos	4
19	KEPALA SUKU BESAR MOI SORONG RAYA PROV. PAPUA BARAT DAYA	17-Nov-25	Lainnya	10
20	Kota Bitung	18-Nov-25	JFAKPD	2
21	DPRD Kota Pasuruan	19-Nov-25	DAK Nonfisik	8
22	Kab. Jeneponto	19-Nov-25	DAU	5
23	Prov. Kalimantan Selatan	20-Nov-25	PDRD, DBH	2
24	Kab. Bandung	20-Nov-25	PDRD	2
25	Prov. Sumatera Selatan	21-Nov-25	DBH Sawit 2025 & 2026	5
26	DPRD Kab. Bone	21-Nov-25	Dana Desa	11
27	Kab. Natuna	21-Nov-25	DBH	5
28	Kab. Buru Selatan	24-Nov-25	PDRD	9
29	Kab. Bungo	24-Nov-25	PDRD	3
30	Kab. Kutai Barat	25-Nov-25	TKD 2026 dan Realisasi APE	9
31	Kab. Bolaang Mongondow	25-Nov-25	Dana Desa	1
32	DPRD Kab. Maluku Tenggara	25-Nov-25	Kenaikan Gaji ASN	10
33	Kab. Parigi Moutong	26-Nov-25	PDRD	12
34	Universitas Andalas	27-Nov-25	Permohonan Data	2
35	Kab. Bojonegoro	27-Nov-25	DBH dan TDF	6
36	Kota Banjar	27-Nov-25	DBH dan DAU	6
37	Kota Surakarta	28-Nov-25	PDRD	9
38	Kota Bandung	28-Nov-25	DAU	6

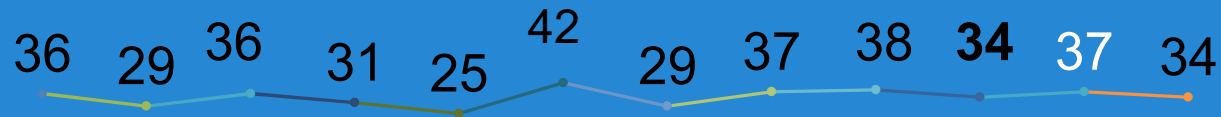


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

Publikasi Konten Media Sosial DJPK



Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 Mei-25 Juni-25 Juli-25 Agt-25 Sep-25 Okt-25 Nov-25 Nov-24



Media Sosial DJPK terdiri dari Instagram (@ditjenpk), Twitter (@DitjenPK), dan Facebook.

Rata-rata publikasi konten media sosial DJPK pada November 2025 **naik 8,82%** dibanding bulan sebelumnya (34). Jika dibandingkan dengan November 2024 (34), rata-rata publikasi konten **naik pula 8,82%**.



Performa Instagram

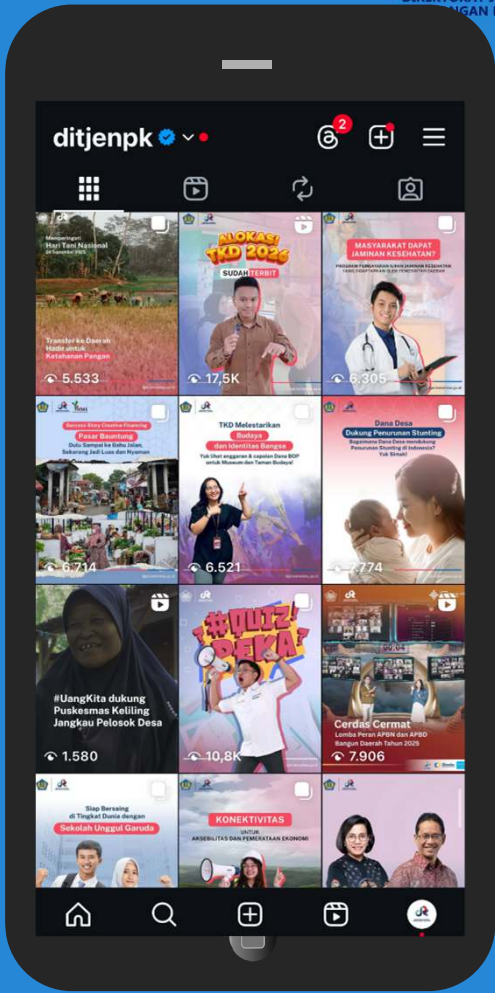
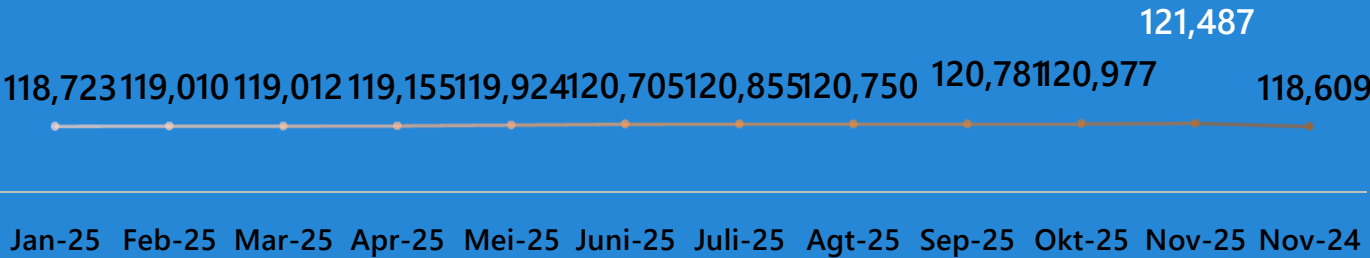


<i>Followers</i> (per 30 November)	121.487
<i>Reach</i> (total)	374.173
<i>Reach</i> (rata-rata)	17.818

Jumlah Unggahan



Grafik perkembangan pengikut Instagram 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Performa (Twitter)

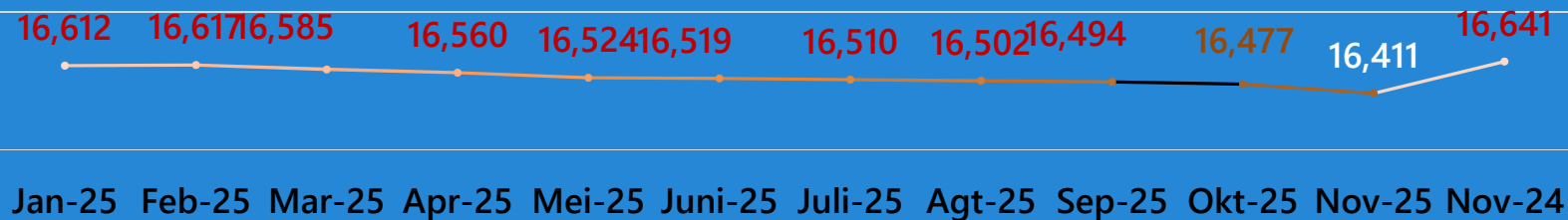


Jumlah Konten

26 konten

<i>Followers</i> (per 30 November)	16.411
<i>Reach</i> (total)	8.019
<i>Reach</i> (rata-rata)	334

Grafik perkembangan pengikut X (Twitter)





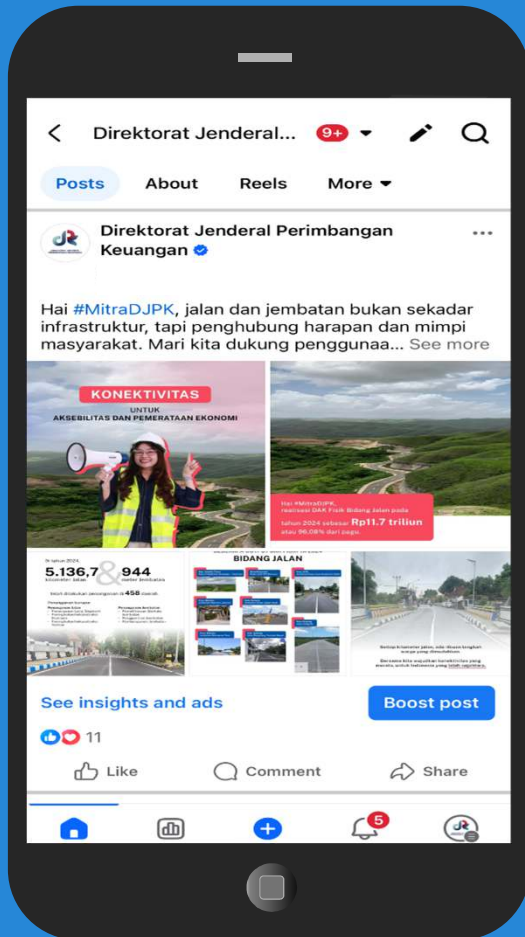
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Performa Facebook

Jumlah Konten

26 konten



Followers (per 30 November)	15.107
Total Reach	116.191
Reach (rata-rata)	4.469

Grafik perkembangan pengikut Facebook 2025

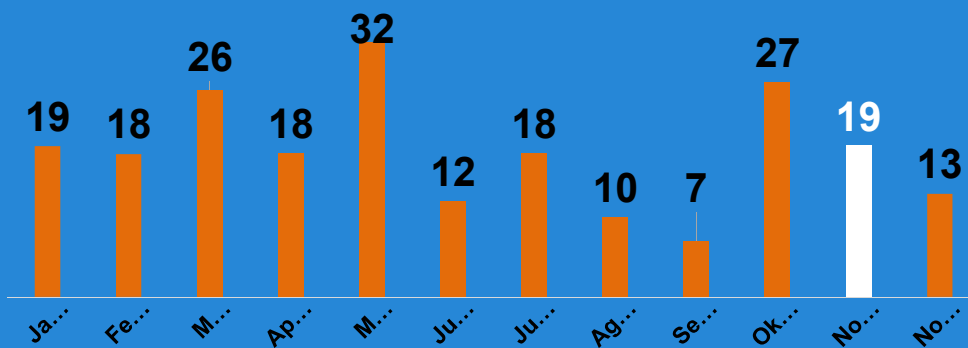




Layanan PPID



Jumlah Permohonan Data melalui PPID Tahun 2025



Selain mempublikasikan data dan informasi melalui website dan media lainnya, DJPK juga melayani permohonan informasi/data melalui **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJPK**.

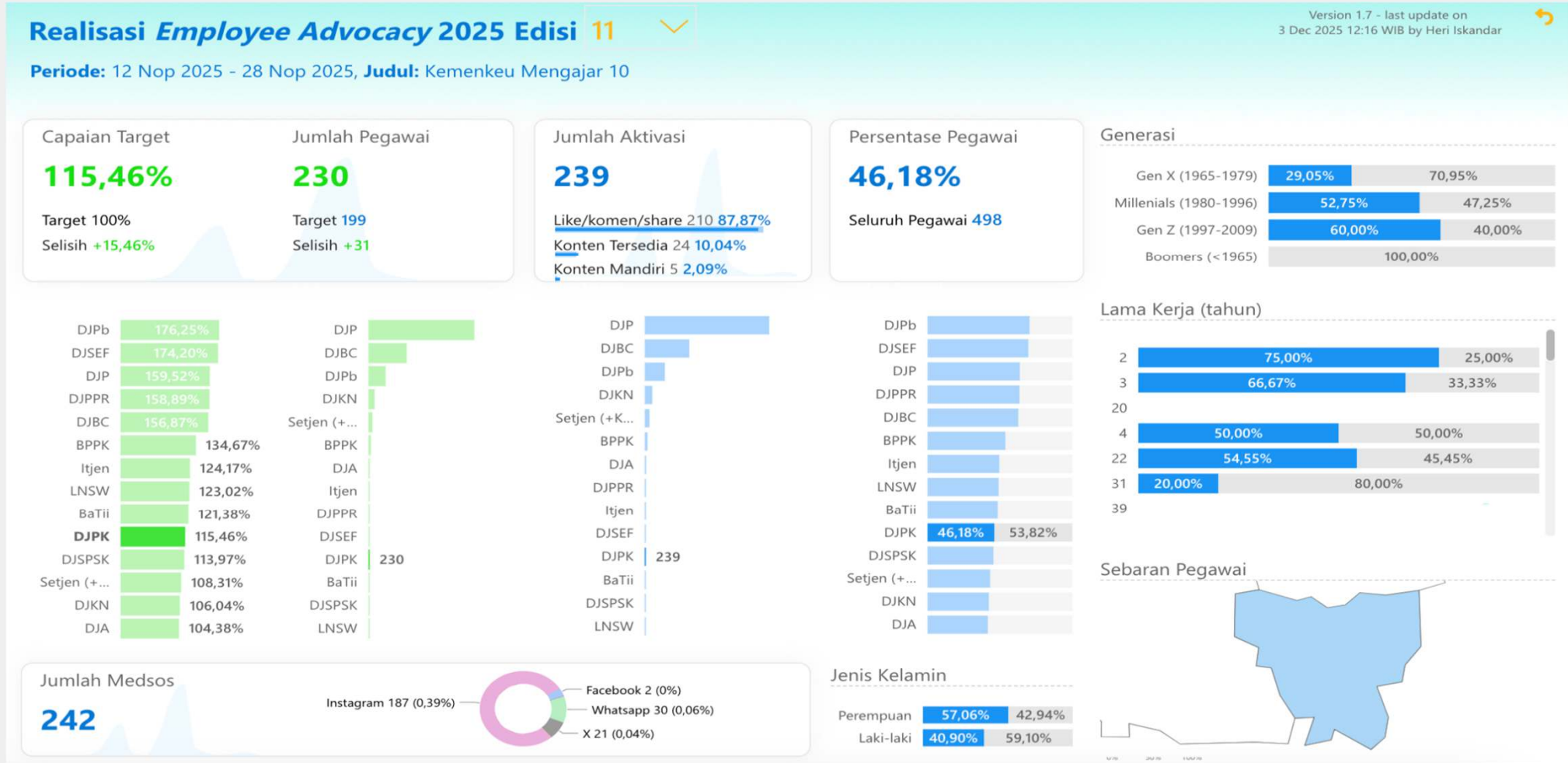
Pada bulan November 2025 terdapat **19** permohonan.

Sebagian besar permintaan data dalam rangka **keperluan penelitian**. Data yang diminta mencakup:

- Data anggaran dan realisasi **APBD**
- Data anggaran dan realisasi **Transfer ke Daerah**

Permohonan data pada November 2025 **turun 30%** dibanding dengan bulan sebelumnya (27) dan **naik 46%** dibandingkan November 2024 (13).

Employee Advocacy



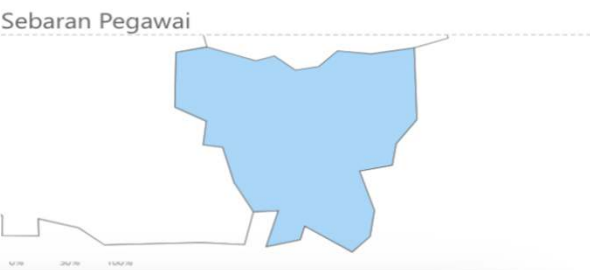
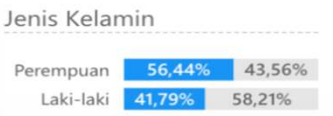
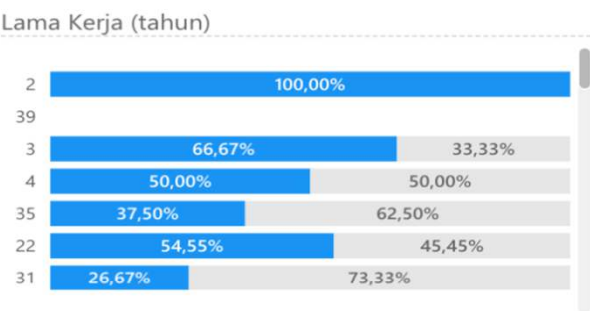
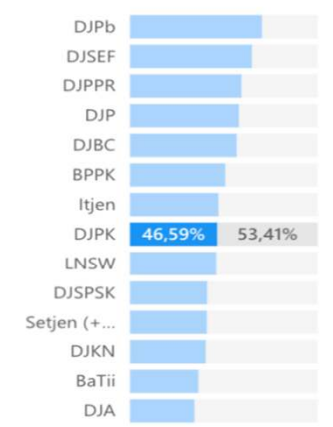
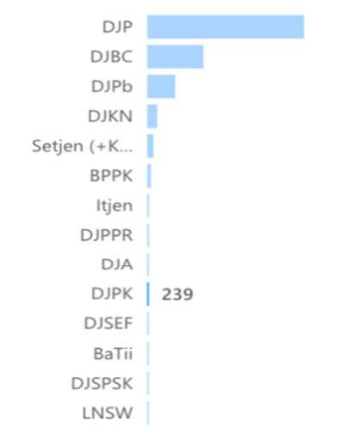
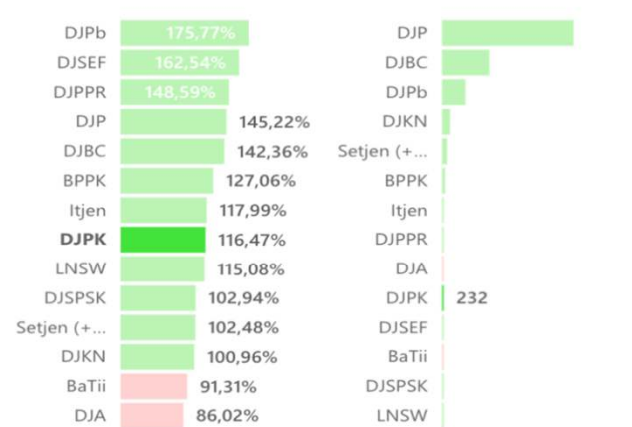
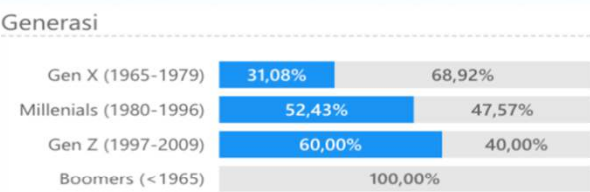
Target DJPK 200 pegawai

Employee Advocacy

Realisasi *Employee Advocacy* 2025 Edisi 12 ✓

Periode: 21 Nop 2025 - 6 Des 2025, Judul: APBN KiTa November 2025

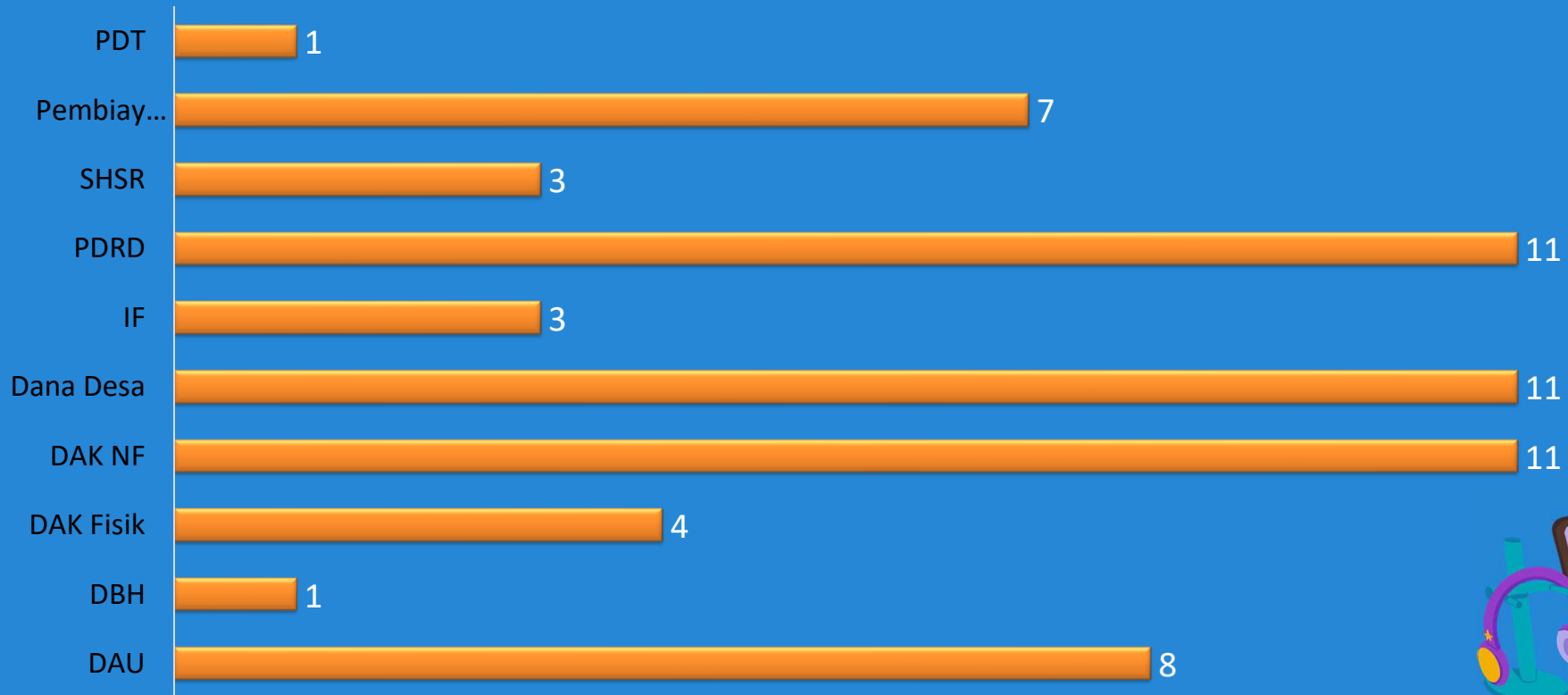
Version 1.7 - last update on
3 Dec 2025 12:16 WIB by Heri Iskandar



Target DJPK 200 pegawai



Jumlah FAQ/Knowledge Base Contact Center DJPK yang Perlu Di-*review*



**Data diperoleh dari FAQ bulan 3 (tiga) bulan terakhir pada tautan <https://bit.ly/FAQDJPK> berdasarkan isian pada kolom perbaikan.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Kepuasan Pengguna Layer 2 (L2) DJPK

Setiap agen minimal memiliki 5 penilaian dari minimal 5 pengguna yang berbeda setiap bulannya.

Survey kepuasan dihitung dari faktor Kepuasan Layanan dan Substansi Jawaban yang diberikan di setiap akhir konsultasi.



5.0



Linna



Hanna



Dian



Horas



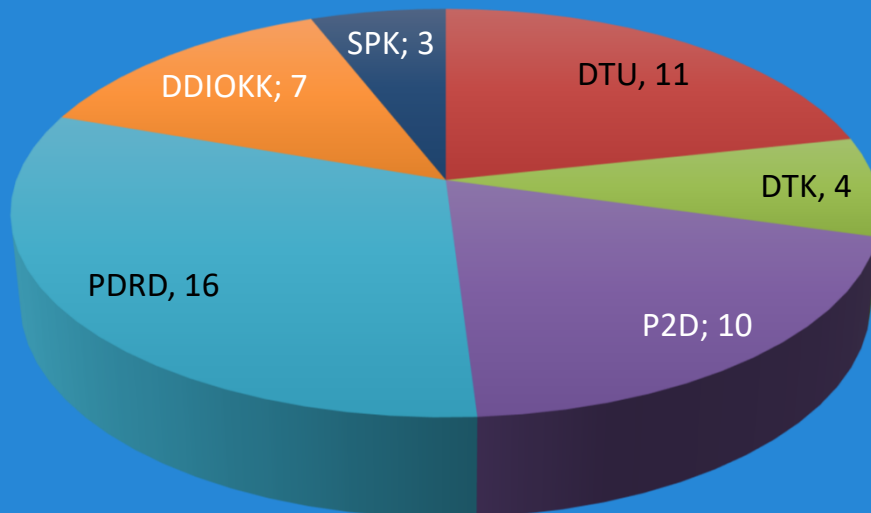
Ronald



Layer 3 (L3) Unit Teknis DJPK

- Mulai Juli 2024, *Layer 2* (L2) melibatkan seluruh unit eselon II di lingkungan DJPK.
- Sejak 16 Juni 2025, Unit Teknis DJPK yang sebelumnya berperan sebagai L2 telah berubah menjadi *Layer 3* (L3) DJPK.
- Apabila diperlukan eskalasi, *Agent L1* Kemenkeu Prime dapat meneruskan ke *Agent L2* DJPK dan dapat dieskalasi lebih lanjut ke L3 Teknis DJPK.

51 Tiket Dieskalasi via Aplikasi CRM Deskpro ke *Layer 3*
pada November 2025



Agen Layer 3	Capaian Rata-rata
Sekretariat	Tidak Ada Eskalasi
DTU	120.0
DTK	120.0
P2D	120.0
PDRD	120.0
DDIOKK	117.1
SPK	113.3

Berdasarkan kecepatan memberikan tanggapan sejak pertanyaan dieskalasi, nilai capaian rata-rata **DTU, DTK, P2D, dan PDRD** mendapatkan nilai **120**.



Layer 3 (L3) Unit Teknis DJPK

Berdasarkan jumlah tiket yang dieskalasi dan rata-rata waktu pemberian tanggapan tercepat,

Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan,
Direktorat Dana Transfer Umum

#1

Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan, Direktorat
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

#1

Tim Reguler Evaluasi Rencana dan
Standar Keuangan Daerah,
Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah

#2

menduduki **peringkat pertama dan kedua** dengan menjawab **16%, 16%, dan 10%** dari total seluruh tiket yang dieskalasi pada November 2025 (51 tiket) dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan **120**.

Keterangan:

- 120 : Tanggapan tiket diberikan pada hari H dan H+1
- 100 : Tanggapan tiket diberikan pada H+2 dan H+3
- 80 : Tanggapan tiket diberikan setelah H+3



Evaluasi Konsultasi DJPK Pascakonsolidasi

Penyelesaian Tiket Konsultasi

- Layanan dilakukan melalui kanal **Kemenkeu PRIME**
- **Mayoritas tiket** diselesaikan oleh **Agen L2 DJPK**



Kendala

- Adanya tiket topik DJPK yang salah assign ke UE I lain
- Adanya tiket yang dieskalasi oleh L1 Kemenkeu PRIME ke L2 DJPK setelah beberapa jam (tidak langsung dieskalasi) sehingga pada saat DJPK menjawab, pengguna layanan sudah menunggu cukup lama

Sesuai **KMK 412 Tahun 2023** tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan, terdapat 2 peran utama:

- Tim Layanan
- Tim Dukungan Layanan



Kondisi di DJPK

- 3 Agen menjalankan kedua peran sekaligus
- 3 Agen mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi tatap muka dan video conference
- 3 Agen melaksanakan tugas tambahan dan dukungan:
 - Pengolahan data
 - Koordinasi internal/eksternal
 - Dukungan ZI WBK
 - Bahan pimpinan dan data
 - Laporan bulanan
 - Knowledge Base

Layanan Reservasi Konsultasi DJPK

Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan konsultasi dan koordinasi jadwal hanya melalui email reservasi.djpk@kemenkeu.go.id



Kendala & Tindak Lanjut

- Terdapat email pengguna layanan yang masuk *black-list* BATII, sehingga tidak masuk ke inbox email reservasi
- Keluhan PL: koordinasi jadwal hanya melalui email sementara PL tidak selalu membuka email (saran dari PL: koordinasi konsultasi melalui 1 nomor whatsapp khusus)



Tantangan Pasca Konsolidasi dan Upaya Solusi

Tantangan

Konsistensi Jawaban Agent Kemenkeu PRIME dan Agent DJPK

Keluhan pengguna layanan atas lamanya waktu mendapatkan tanggapan, hal ini karena tiket ke DJPK membutuhkan proses eskalasi terlebih dahulu oleh Kemenkeu PRIME

Adanya keluhan pengguna layanan yang merasa sulit terhubung dengan DJPK

Beban Kerja Agent L2 DJPK
(saat ini 2 agent ditugaskan secondment)

Meningkatnya jumlah konsultasi tatap muka pasca konsolidasi

Upaya Solusi

Dukungan Knowledge Base (KMS) berupa QNA topik DJPK dilakukan setiap bulan dan *Sharing Session* berkala sesuai permintaan KLI

Telah dibentuk WA Grup antara Kemenkeu PRIME dan DJPK untuk pelaksanaan koordinasi penanganan tiket

Diseminasi informasi konsolidasi baik secara internal maupun eksternal terus dilakukan, antara lain melalui kanal media sosial, kegiatan DJPK (internal dan eksternal), dan informasi dalam surat keluar DJPK

Penambahan Agent CC, mengingat agent melaksanakan tugas layanan dan dukungan layanan

Revisi SE-2 tentang Mekanisme Layanan Konsultasi DJPK yang memuat ketentuan secara rinci antara lain alur, ketentuan jadwal, dan ketentuan jumlah tamu



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih

*Bersama, Kita Tingkatkan Layanan
Publik yang Lebih Baik*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1

Jakarta Pusat 10710

Gedung Radius Prawiro